



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

**SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI BALI**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Denpasar, 25 April 2022

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI BALI



Ida Bagus Putu Adinatha, AP. M.Si
NIP. 19740826 199311 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

F. Pengungkapan Penting Lainnya

VI. Lampiran



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Jalan Moh. Yamin No 17/19, Denpasar
Telepon/Fax : 0361-263859, E-mail : bawaslu.baliprov@gmail.com
Laman : www.bawaslu-baliprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, 25 April 2022

Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Bali




Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si
NIP. 19740826 199311 1 003

Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali per 31 Desember Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2021.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember Tahun 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp86.227.400,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp23.030.442.595,00 atau mencapai 90,72 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp25.387.218.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember Tahun 2021.

Nilai Aset per 31 Desember Tahun 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.483.875.934,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp47.262.113,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.387.877.550,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp48.736.271,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp26.541.929,00 dan Rp2.457.334.005,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit - LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO pada per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp23.768.616.232,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp23.768.616.232,00 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp113.272.600,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp23.881.888.832,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp12.758.699.920,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp23.881.888.832,00 dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp7.817.343.982,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp21.397.866.899,00 sehingga mengalami Penurunan Ekuitas sebesar Rp10.301.365.915,00 Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember Tahun 2021 adalah senilai Rp2.457.334.005,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Tahun 2021		% thd Angg	Tahun 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	86.227.400	-	45.501.681
JUMLAH PENDAPATAN		-	86.227.400	0,00	45.501.681
BELANJA					
Belanja Operasional	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	7.646.935.000	7.273.117.863	95,11	6.831.602.398
Belanja Barang	B.4	17.409.283.000	15.431.418.232	88,64	51.952.614.043
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasional		25.056.218.000	22.704.536.095	90,61	58.784.216.441
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.5	331.000.000	325.906.500	98,46	256.475.000
Jumlah Belanja Modal		331.000.000	325.906.500	98,46	256.475.000
JUMLAH BELANJA		25.387.218.000	23.030.442.595	90,72	59.040.691.441

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Tahun 2021	Tahun 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	-	9.471.917.017
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	46.350.000	-
Persediaan	C.3	912.113	343.200
Jumlah Aset Lancar		47.262.113	9.472.260.217
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	7.737.696.278	7.648.399.267
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.5	9.375.000	9.375.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	189.900.000	199.500.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(5.549.093.728)	(4.611.142.805)
Jumlah Aset Tetap		2.387.877.550	3.246.131.462
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	151.240.000	151.240.000
Aset Lain-lain	C.9	137.839.489	
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(240.343.218)	(103.698.750)
Jumlah Aset Lainnya		48.736.271	47.541.250
JUMLAH ASET		2.483.875.934	12.765.932.929
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	26.541.929	7.233.009
Uang Muka dari KPPN		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		26.541.929	7.233.009
JUMLAH KEWAJIBAN		26.541.929	7.233.009
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	2.457.334.005	12.758.699.920
JUMLAH EKUITAS		2.457.334.005	12.758.699.920
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.483.875.934	12.765.932.929

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Tahun 2021	Tahun 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	11.598.144
JUMLAH PENDAPATAN		-	11.598.144
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	7.278.235.385	6.831.602.398
Beban Persediaan	D.3	14.187.874	87.410.400
Beban Barang dan Jasa	D.4	10.967.468.415	41.210.143.667
Beban Pemeliharaan	D.5	654.451.304	1.054.495.304
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.780.173.124	11.914.907.443
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.074.100.130	1.205.751.772
JUMLAH BEBAN		23.768.616.232	62.304.310.984
DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(23.768.616.232)	(62.292.712.840)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(195.400.100)	(116.670.000)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		4.099.900	31.800.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		199.500.000	148.470.000
KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		82.127.500	(375.313.444)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		82.127.500	31.350.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	406.663.444
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	(113.272.600)	(491.983.444)
DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(23.881.888.832)	(62.784.696.284)
POS LUAR BIASA		-	-
DEFISIT LO	D.9	(23.881.888.832)	(62.784.696.284)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Tahun 2021	Tahun 2020
EKUITAS AWAL	E.1	12.758.699.920	10.490.448.827
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(23.881.888.832)	(62.784.696.284)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(7.817.343.982)	17.363.450
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3	(955.500)	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP/LAINNYA NON REVALUASI	E.4	460.239	17.363.450
KOREKSI LAIN-LAIN	E.5	(7.816.848.721)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	21.397.866.899	65.035.583.927
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	(10.301.365.915)	2.268.251.093
EKUITAS AKHIR	E.8	2.457.334.005	12.758.699.920

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0517/BAWASLU/SJ/KU.02/XII/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
19. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
20. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-18/PB/PB.6/2021 tanggal 07 Juli 2021 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2021.
21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01-0/2021 Tanggal 23 November 2020.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan berdasarkan Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Entitas berkedudukan di Jalan Moh. Yamin Nomor 17/19 Denpasar, Bali. Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan di atas Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
 - Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
 - Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
 - Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;

- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu :

- a) Kepala Bagian Administrasi;
- b) Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;
- c) Kepala Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan

/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak sembilan kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya pemotongan anggaran berkaitan dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan penambahan anggaran berkaitan dengan tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah baik dari rupiah murni (RM) maupun hibah dalam negeri (HDN). Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel B.1 Pagu Anggaran Belanja

Uraian	31 Desember Tahun 2021	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Belanja (RM):		
Belanja Pegawai	7.816.685.000	7.646.935.000
Belanja Barang	16.259.795.000	15.054.521.000
Belanja Modal	141.000.000	331.000.000
Jumlah Belanja (RM)	24.217.480.000	23.032.456.000
Pinjaman dan Hibah:		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	-	2.354.762.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Pinjaman dan Hibah	-	2.354.762.000
Jumlah Belanja	24.217.480.000	25.387.218.000

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp86.227.400,00

Realisasi Pendapatan per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp86.227.400,00 dan Rp45.501.681,00. Pendapatan ini merupakan hasil dari pengembalian pembayaran honorarium pokja pilkada tahun 2020 pada Bawaslu kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan dan Karangasem, serta pendapatan lelang barang BMN tahun 2021. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel B.1.1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	4.099.900	(100,00)
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	-	82.127.500	(100,00)
Jumlah	-	86.227.400	(100,00)

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya merupakan pendapatan lelang tahun 2021 yaitu 1 paket BMN berupa 16 unit inventaris terdiri dari alat penghancur kertas, meja kerja kantor, meja rapat, AC split, dispenser, alat rumah tangga lainnya, laptop dan printer. Sedangkan untuk Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalun merupakan pendapatan pengembalian honor pokja tahun 2020 pada Bawaslu Kabupaten Badung, Bawaslu Kabupaten Tabanan, Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Bawaslu Kabupaten Jembrana. Adapun Rinciannya sebagai berikut:

Tabel B.1.2 Rincian dari Uraian Realisasi Pendapatan

Uraian	Tanggal	NTPN	Nilai
Pendapatan lelang BMN tahun 2021	04/02/2021	36C058N3DNEE6F5	4.099.900
Pengembalian honor Pokja Bawaslu Kab. Badung	28/04/2021	799BD48VUTP5NPCS	18.335.000
Pengembalian honor Pokja Bawaslu Kab. Tabanan	28/04/2021	CFA4348VUIP5P5TQ	54.482.500
Pengembalian honor Pokja Bawaslu Kab. Karangasem	28/04/2021	1684Q9N3DNL303JP	285.000
Pengembalian honor Pokja Bawaslu Kab. Jembrana	28/04/2021	98D642G4UTKCVB7E	9.025.000
Jumlah			86.227.400

Tabel B.1.3 Realisasi dan Perbandingan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Giro Keuangan	-	13.701.681	(100)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	4.099.900	31.800.000	-
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	82.127.500	-	-
Jumlah	86.227.400	45.501.681	90

Realisasi Belanja
Rp23.030.442.595

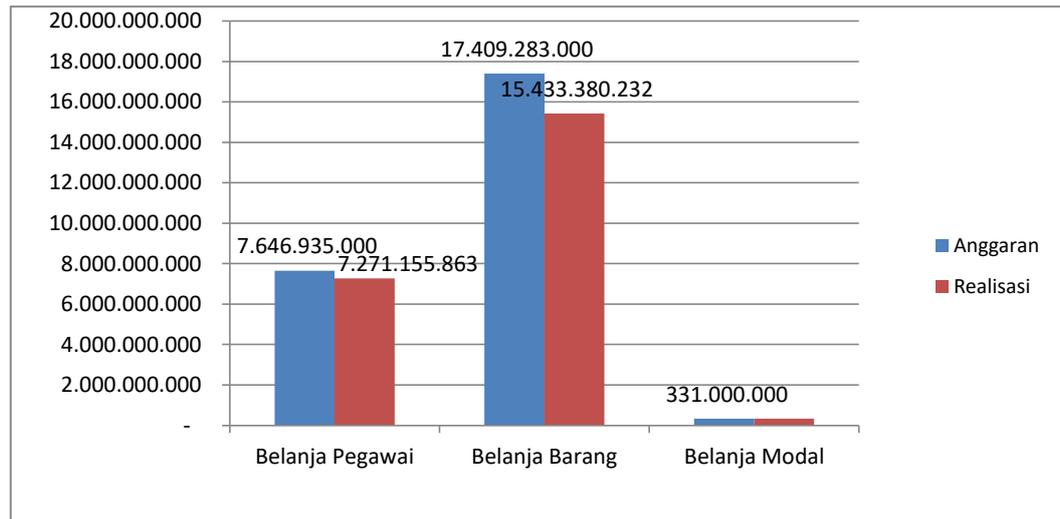
B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi (beserta hibah langsung) per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp23.030.442.595,00 dan Rp59.040.691.441,00. Realisasi Belanja per 31 Desember Tahun 2021 telah mencapai 91% dari anggaran belanja sebesar Rp25.387.218.000,00. Adapun Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Tahun 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Rupiah Murni :			
Belanja Pegawai	7.646.935.000	7.275.928.230	95,15
Belanja Barang	15.054.521.000	13.778.311.936	91,52
Belanja Modal	331.000.000	325.906.500	98,46
Jumlah	23.032.456.000	21.380.146.666	92,83
Pinjaman dan Hibah :			
Belanja Barang	2.354.762.000	1.655.068.296	70,29
Jumlah	2.354.762.000	1.655.068.296	70,29
Total Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	4.772.367	-
Jumlah	25.387.218.000	23.030.442.595	90,72

Grafik B.2.1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Tabel B.2.2 Perbandingan Realisasi Belanja

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	7.275.928.230	6.831.602.440	6,50
Belanja Barang	15.433.380.232	51.952.614.043	(70,29)
Belanja Modal	325.906.500	256.475.000	27,07
Total Belanja Kotor	23.035.214.962	59.040.691.483	(60,98)
Pengembalian Belanja	4.772.367	42	
Jumlah	23.030.442.595	59.040.691.441	(60,99)

Realisasi Belanja pada 31 Desember Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 60,99% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan Realisasi Belanja barang yang lebih rendah disebabkan pada Semester II tahun 2020 dilaksanakan kegiatan-kegiatan rapat tahapan pilkada tahun 2020.

Belanja Pegawai
Rp7.273.117.863

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.273.117.863,00 dan Rp6.831.602.398,00. Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan telah dibayarkannya Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 untuk Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pejabat Struktural dan Staf PNS Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun Rincian untuk Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel B.3.1 Rincian dan Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	NaikK (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	870.240.630	591.936.640	47,02
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	5.753.281.000	5.687.951.000	1,15
Belanja Uang Lembur	0	0	-
Belanja Pegawai (Tunjangan) Khusus	652.406.600	551.714.800	18,25
Jumlah Belanja Kotor	7.275.928.230	6.831.602.440	6,50
Pengembalian Belanja Pegawai	2.810.367	42	-
Jumlah Belanja	7.273.117.863	6.831.602.398	6,46

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember Tahun 2021 digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS Bawaslu Provinsi dan Kabupaten, pembayaran gaji dan tunjangan pejabat negara Bawaslu Provinsi dan

Kabupaten/Kota, pembayaran THR dan Gaji ke-13 untuk Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pejabat Struktural dan Staf PNS Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Belanja Barang
Rp15.433.380.232

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.433.380.232,00 dan Rp51.952.614.043,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 70,30% dari Realisasi Belanja Barang tahun sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan Kegiatan Operasional Perkantoran dan Kegiatan Rapat tahapan pilkada tahun 2020 dilakukan pada semester II tahun 2020. Adapun rincian Realisasi Belanja Barang tersaji sebagai berikut:

Tabel B.4.1 Rincian dan Perbandingan Realisasi Belanja Barang

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	9.379.420.035	25.285.201.774	(62,91)
Belanja Barang Non Operasional	742.323.405	9.470.760.707	(92,16)
Belanja Barang Persediaan	14.756.787	87.641.100	(83,16)
Belanja Jasa	862.255.577	4.139.607.715	(79,17)
Belanja Pemeliharaan	654.451.304	1.054.495.304	(37,94)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.780.173.124	11.914.907.443	(68,27)
Jumlah Belanja Kotor	15.433.380.232	51.952.614.043	(70,29)
Pengembalian Belanja	(1.962.000)	-	
Jumlah Belanja	15.431.418.232	51.952.614.043	(70,30)

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp15.431.418.232,00 berasal dari sumber dana rupiah murni (RM) dan hibah dalam negeri (HDN) masing-masing sebesar Rp13.776.349.936,00 dan Rp1.655.068.296,00.

Belanja Barang
(RM)
Rp13.776.349.936

B.4.1 Belanja Barang (RM)

Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.776.349.936,00 dan Rp18.207.140.210,00. Adapun Rincian Realisasi Belanja Barang (RM) adalah sebagai berikut:

Tabel B.4.1 Rincian dan Perbandingan Realisasi Belanja Barang (RM)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Barang Operasional	8.659.158.156	12.163.462.918
Belanja Barang Non Operasional	546.138.605	607.046.464
Belanja Barang Persediaan	14.756.787	87.641.100
Belanja Jasa	845.059.080	1.186.102.828
Belanja Pemeliharaan	647.311.304	867.567.715
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.065.888.004	3.295.319.185
Jumlah Belanja Kotor	13.778.311.936	18.207.140.210
Pengembalian Belanja (RM)	(1.962.000)	-
Jumlah Belanja	13.776.349.936	18.207.140.210

Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp13.776.349.936,00 dipergunakan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Pembinaan SDM Pengawasan dan Kesekretariatan
3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program
4. Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pilkada Kabupaten/Kota
5. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN
6. Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu
7. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pilkada Kabupaten/Kota
8. Pembinaan SDM Peningkatan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada Kabupaten/Kota
9. Pembahasan Teknis Launching Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)
10. Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)
11. Kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan
12. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

Dari Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp13.776.349.936,00 terdapat Realisasi Belanja (RM) yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp272.990.586,00. Adapun Rincian Realisasi Belanja (RM) dalam rangka penanganan COVID-19 adalah sebagai berikut:

Tabel B.4.1.1 Rincian Realisasi Belanja Barang (RM) Penanganan Pandemi Covid-19

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Barang Operasional	231.942.586	2.508.469.070
Belanja Barang Persediaan	1.595.000	75.760.000
Belanja Jasa	39.453.000	919.603.200
Belanja Pemeliharaan	-	4.647.000
Jumlah Belanja Kotor	272.990.586	3.508.479.270
Pengembalian Belanja (RM)	-	-
Jumlah Belanja	272.990.586	3.508.479.270

Belanja Barang (RM) dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dipergunakan antara lain sebagai berikut:

1. Pengadaan masker/*hand sanitizer* untuk kegiatan maupun persediaan;
2. Biaya penyemprotan disinfektan di area kantor;
3. Pengadaan lisensi aplikasi *video conference* sampai dengan 1 tahun;
4. Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh;
5. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa/paket data internet untuk kegiatan rapat secara daring/online;
6. Pengadaan APD/alat uji medis/*rapid test*/Biaya pelaksanaan *rapid test* oleh pihak ketiga.

Belanja Barang
(HDN)
Rp1.655.068.296

B.4.2 Belanja Barang (HDN)

Realisasi Belanja Barang (HDN) per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.655.068.296,00 dan Rp33.745.473.833,00.

Tabel B.4.2 Rincian Realisasi Belanja Barang (HDN)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Barang Operasional	720.261.879	13.121.738.856
Belanja Barang Non Operasional	196.184.800	8.863.714.243
Belanja Jasa	17.196.497	2.953.504.887
Belanja Pemeliharaan	7.140.000	186.927.589
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	714.285.120	8.619.588.258
Jumlah Belanja Kotor	1.655.068.296	33.745.473.833
Pengembalian Belanja Barang (HDN)	-	-
Jumlah Belanja	1.655.068.296	33.745.473.833

Realisasi Belanja Barang (HDN) sebesar Rp1.655.068.296,00 dipergunakan untuk Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati / Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020. Adapun Rincian Rekapitulasi Realisasi Belanja Barang (HDN) per Kabupaten/Kota yang Berpilkada disajikan sebagai berikut:

Tabel B.4.2.1 Rincian Realisasi Belanja Barang (HDN) per Kabupaten/Kota

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2021
KAB. BADUNG	258.148.736	6.785.436.831
KAB. BANGLI	211.365.560	4.766.351.336
KOTA DENPASAR	349.063.600	5.334.365.730
KAB. JEMBRANA	182.768.400	3.556.485.838
KAB. KARANGASEM	389.493.000	6.781.713.443
KAB. TABANAN	264.229.000	6.521.120.655
Jumlah Belanja	1.655.068.296	33.745.473.833

Belanja Modal
Rp325.906.500

B.5 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp325.906.500,00 dan Rp256.475.000,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 27,07 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena per 31 Desember Tahun 2021 telah dilakukan pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi dan Peralatan Fasilitas Perkantoran serta pengadaan Renovasi Gedung dan Bangunan di Bawaslu Provinsi Bali.

Tabel B.5 Rincian dan Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.006.500	17.600.000	672,76
Belanja Modal Lainnya	189.900.000	238.875.000	(20,50)
Jumlah Belanja Kotor	325.906.500	256.475.000	27,07
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	325.906.500	256.475.000	27,07

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp136.006.500,00 dan Rp17.600.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 672,76 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.

Tabel B.5.1 Realisasi dan Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.006.500	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	-	17.600.000	-
Jumlah Belanja Kotor	136.006.500	17.600.000	672,76
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Belanja	136.006.500	17.600.000	672,76

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan Realisasi Belanja Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi serta Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel B.5.1.1 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Kuantitas	Nilai
Peralatan dan Mesin:		
1. Voice Recorder	9	8.835.000
2. Camera Digital	9	47.490.000
3. LCD Projektor/Infocus	9	29.884.000
4. Focusing Screen/Layar LCD Projector	9	8.860.000
5. External/Portable Hardisk	1	1.384.500
6. Sound System	9	30.559.000
7. Televisi	2	8.994.000
Jumlah	48	136.006.500

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp189.900.000,00 dan Rp238.875.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 20,50 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena per 31 Desember Tahun 2020 telah dilakukan pengadaan Renovasi Gedung dan Bangunan di Bawaslu Provinsi Bali serta pengadaan Pengembangan Website Bawaslu Provinsi dan Website PPID Bawaslu Provinsi Bali.

Tabel B.5.2 Realisasi dan Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	189.900.000	238.875.000	(20,50)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	189.900.000	238.875.000	(20,50)
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja	189.900.000	238.875.000	(20,50)

Belanja Modal Lainnya sebesar Rp189.900.000,00 yaitu Renovasi Gedung dan Bangunan di kantor Bawaslu Provinsi Bali berupa pembuatan tempat arsip/penyimpanan berkas dan pelebaran ruang kerja bagian keuangan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp9.471.917.017,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel C.1 Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	Tahun 2021	Tahun 2020
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	9.471.917.017
Jumlah	-	9.471.917.017

Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Rp46.350.000

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp46.350.000,00 dan Rp0,00. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan pengeluaran Satker/pemerintah yg telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara & membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati Satker/pemerintah yaitu berupa belanja sewa kendaraan roda-4 untuk bawaslub kabupaten/kota. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) adalah sebagai berikut:

Tabel C.2 Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Jenis	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	46.350.000	-
Jumlah	46.350.000	-

Persediaan
Rp912.113

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 masing-masing adalah sebesar Rp912.113,00 dan Rp343.200,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Adapun Rinciannya sebagai berikut:

Tabel C.3 Perbandingan Persediaan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020
Persediaan Barang Konsumsi	912.113	343.200
Jumlah	912.113	343.200

Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan per 31 Desember Tahun 2021, seluruh barang persediaan dalam keadaan kondisi baik. Adapun Rincian Barang Persediaannya adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.1 Rincian Barang Persediaan

Persediaan	Tahun 2021	Kuantitas
Barang Konsumsi		
- Pena Snowman V1 Semi Gell Htm	8.525	5
- Amplop Samson D	38.016	1
- Trigonal Clip No. 5 Kenko	19.030	5
- Trigonal Clip No. 3 Joyko	9.042	6
- Stopmap Bawaslu	675.000	90
- Buku Disposisi	162.500	13
Jumlah	912.113	120

Adapun Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	343.200
Mutasi tambah:	14.756.787
Pembelian	14.756.787
Hibah (Masuk)	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Koreksi Tambah	-
Mutasi kurang:	14.187.874
Pemakaian	14.187.874
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Barang Usang	-
Saldo per 31 Desember 2021	912.113

Adapun Rincian untuk Pembelian dan Pemakaian nilai persediaan per 31 Desember Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam **Lampiran C.3**

Peralatan dan Mesin
Rp7.737.696.278

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 masing-masing adalah Rp7.737.696.278,00 dan Rp7.648.399.267,00. Perbandingan dan Rincian Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel C.4 Perbandingan Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Peralatan dan Mesin	7.737.696.278	7.648.399.267
Jumlah	7.737.696.278	7.648.399.267

Adapun untuk Rincian nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam **Lampiran C.4**

Adapun mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	7.648.399.267
Mutasi tambah:	244.726.500
Saldo Awal	-
Pembelian	136.006.500
Perolehan Lainnya	108.720.000
Transfer Masuk Barang	-
Mutasi kurang:	155.429.489
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	17.590.000
Penghentian dari penggunaan	137.839.489
Saldo per 31 Desember 2021	7.737.696.278
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-5.539.718.728
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.197.977.550

Adapun Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.1 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

URAIAN	Kuantitas	Nilai
Peralatan dan Mesin:		
1. Voice Recorder	9	8.835.000
2. Camera Digital	9	47.490.000
3. LCD Projektor/Infocus	9	29.884.000
4. Focusing Screen/Layar LCD Projector	9	8.860.000
5. External/Portable Hardisk	1	1.384.500
6. Sound System	9	30.559.000
7. Televisi	2	8.994.000
Jumlah	48	136.006.500

Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin merupakan hibah (masuk) berupa hibah barang peralatan dan mesin Pemerintah Provinsi Bali kepada Bawaslu Provinsi Bali. Adapun Rincian Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.2 Rincian Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin

Uraian	Kuantitas	Nilai
Peralatan dan Mesin:		
1. Lemari Kayu	1	3.000.000
2. Rak Kayu	13	33.700.000
3. Meja Kerja Kayu	15	36.875.000
4. Kursi Besi/Metal	17	21.145.000
5. Sice	1	5.500.000
6. Meja Rapat	1	2.500.000
7. A.C. Split	1	4.000.000
8. Kipas Angin	2	2.000.000
Jumlah	51	108.720.000

Adapun Rincian Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel C.4.2 Rincian Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

Uraian	Kuantitas	Nilai
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin		
1. Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	4.860.000
2. Voice Recorder	6	5.835.000
3. Kursi Besi/Metal	14	6.895.000
Jumlah	25	17.590.000

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp9.375.000,00

C.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.375.000,00 dan Rp9.375.000,00. Saldo tersebut merupakan jaringan instalansi lain-lain.

Tabel C.5 Perbandingan Jalan, Irigasi dan Mesin

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Jaringan Instalansi Lain-lain	9.375.000	9.375.000
Jumlah	9.375.000	9.375.000

Adapun mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	9.375.000
Mutasi tambah:	-
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per per 31 Desember 2021	9.375.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(9.375.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Aset Tetap Lainnya
Rp189.900.000

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Dalam hal ini merupakan aset tetap renovasi gedung. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 masing-masing adalah Rp189.900.000,00 dan Rp199.500.000,00. Perbandingan Rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel C.6 Perbandingan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan	189.900.000	199.500.000
Jumlah	189.900.000	199.500.000

Adapun mutasi nilai Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	199.500.000
Mutasi tambah:	189.900.000
Pembelian	189.900.000
Mutasi kurang:	199.500.000
Hibah Keluar	199.500.000
Saldo per 31 Desember 2021	189.900.000

Pada 31 Desember Tahun 2021 nilai perolehan sebesar Rp189.900.000,00 dikarenakan ada mutasi tambah dan kurang masing-masing sebesar Rp189.900.000,00 dan Rp199.500.000,00. Aset Tetap Lainnya terjadi Mutasi tambah sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 012/PL.06/SPK/09/2021 yaitu pekerjaan renovasi gedung dan bangunan pada Bawaslu Provinsi Bali. Sedangkan ada mutasi kurang pada Aset Tetap Lainnya yaitu Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Bawaslu Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali

Nomor: 0023.1/PL.04/SJ/01/2021 garis bawah Nomor: 028/357/PBMD.BPKAD adalah hibah barang milik negara (BMN) berupa aset tetap renovasi pada Bawaslu Provinsi Bali kepada pemerintah Provinsi Bali. Adapun Rinciannya sebagai berikut:

Tabel C.6.1 Rincian Pembelian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
Aset tetap renovasi (renovasi gedung / bangunan sebelah utara)	2021	172.620.000
Jumlah		172.620.000

Tabel C.6.2 Rincian Hibah Keluar Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
Aset tetap renovasi (renovasi gedung / bangunan sebelah utara)	2020	172.620.000
Aset tetap renovasi (renovasi gedung / bangunan sebelah selatan)	2020	26.880.000
Jumlah		199.500.000

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp5.549.093.728

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing Rp5.549.093.728,00 dan Rp4.611.142.805,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Adapun Perbandingan dan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel C.7 Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Peralatan dan Mesin	5.539.718.728	4.601.767.805
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.375.000	9.375.000
Jumlah	5.549.093.728	4.611.142.805

Tabel C.7.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7.737.696.278	5.539.718.728	2.197.977.550
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.375.000	9.375.000	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		7.747.071.278	5.549.093.728	2.197.977.550

Adapun untuk Rincian Nilai Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam **Lampiran C.7**

Aset Tak Berwujud
Rp151.240.000,00

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp151.240.000,00 dan Rp151.240.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Bawaslu Provinsi Bali berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Perbandingan dan Rincian Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel C.8 Perbandingan Aset Tak Berwujud

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Software Komputer	151.240.000	151.240.000
Jumlah	151.240.000	151.240.000

Tabel C.8.1 Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
Website bali.bawaslu.go.id	69.535.000
Website jembrana.bawaslu.go.id	10.000.000
Website denpasar.bawaslu.go.id	10.000.000
Website klungkung.bawaslu.go.id	8.195.000
Website gianyar.bawaslu.go.id	10.000.000
Website badung.bawaslu.go.id	9.845.000
Website bangli.bawaslu.go.id	9.500.000
Website tabanan.bawaslu.go.id	8.195.000
Website karangasem.bawaslu.go.id	8.470.000
Website buleleng.bawaslu.go.id	7.500.000
Total	151.240.000

Adapun mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	151.240.000
Mutasi tambah:	-
Pengembangan BMN Langsung	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2021	151.240.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	124.125.000
Nilai Buku per 31 Desember 2021	27.115.000

Aset Lain-Lain
Rp137.839.489,00

C.9 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah Rp137.839.489,00 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun untuk Perbandingan dan Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel C.9 Perbandingan Aset Lain-Lain

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	137.839.489	-
Jumlah	137.839.489	-

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	-
Mutasi tambah:	-
- reklasifikasi dari aset tetap	137.839.489
Mutasi kurang:	-
- reklasifikasi dari aset tetap	-
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2021	137.839.489
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	116.218.218
Nilai Buku per 31 Desember 2021	21.621.271

Sedangkan untuk transaksi mutasi tambah aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.9.1 Rincian Aset Lain-Lain

No	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	LCD Projector/Infocus	2	18.196.200
2	Meja Kerja Kayu	1	2.000.000
3	A.C. Split	1	4.500.000
4	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	650.000
5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	6.435.000
6	Voice Recorder	1	1.600.000
7	Alat Kedokteran Umum Lainnya	2	3.520.000
8	P.C Unit	2	23.240.000
9	Lap Top	2	22.723.289
10	Note Book	1	9.950.000
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.950.000
12	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	39.375.000
13	External/ Portable Hardisk	1	1.700.000
Total		20	137.839.489

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp240.343.218

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing Rp240.343.218,00 dan Rp103.698.750,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel C.10 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Uraian	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi	Nilai Buku
Software Komputer/Website	10	151.240.000	124.125.000	27.115.000
Aset Tetap yang tidak digunakan	20	137.839.489	116.218.218	21.621.271
Jumlah	30	289.079.489	240.343.218	48.736.271

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp26.541.929

C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp26.541.929,00 dan Rp7.233.009,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih

harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel C.11 Perbandingan dan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	5.117.522	-	-
Belanja barang yang masih harus dibayar	21.424.407	7.233.009	196
Jumlah	26.541.929	7.233.009	267

Utang Pihak Ketiga pada 31 Desember Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 267 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Beban Langganan Internet, Telepon, Air dan Listrik nilai tagihannya lebih besar dibandingkan dengan nilai tagihan pada tahun sebelumnya. Selain itu dikarenakan ada Beban Gaji Pokok, Beban Tunjangan Suami/Istri, Beban Tunjangan Anak dan Beban Pembulatan Gaji Cdns untuk pembayaran kekurangan gaji Cdns serta Beban Tunjangan Struktural untuk pembayaran gaji susulan tunjangan struktural Bawaslu Kota Denpasar.

Ekuitas Rp2.457.334.005

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.457.334.005,00 dan Rp12.758.699.920,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih Entitas yang merupakan selisih antara Aset sebesar Rp2.483.875.934,00 dan kewajiban sebesar Rp26.541.929,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp11.598.144,00. Adapun rincian Pendapatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel D.1 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	11.598.144	100,00
Jumlah	-	11.598.144	(90.11)

Beban Pegawai
Rp7.278.235.385

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.278.235.385,00 dan Rp6.831.602.398,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel D.2 Rincian Beban Pegawai

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji PNS	872.547.785	591.936.598	47
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	5.753.281.000	5.687.951.000	1
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	652.406.600	551.714.800	18
Jumlah	7.278.235.385	6.831.602.398	7

Kenaikan Beban Pegawai dikarenakan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pejabat Struktural dan staf PNS Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota mendapatkan Tunjangan Hari Raya serta Tunjangan Gaji ke 13 serta pembayaran gaji untuk CPNS 2019. Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Pegawai dibandingkan jumlah Beban Pegawai, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Belanja Pegawai	Rp	7.273.117.863
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Dimuka	Rp	5.117.522
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	7.278.235.385
Mutasi Kurang:		
Jurnal Balik Atas Beban Tahun Yang Lalu	Rp	-
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	-
Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021	Rp	7.278.235.385

Beban Persediaan
Rp14.187.874

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.187.874,00 dan Rp87.410.400,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel D.3 Rincian Beban Persediaan

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	14.187.874	87.410.400	(83,77)
Jumlah Beban Persediaan	14.187.874	87.410.400	(83,77)

Ada penurunan Beban Persediaan dikarenakan pada tahun 2020 adanya belanja barang persediaan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 yaitu thermogun untuk Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Barang Persediaan dibandingkan jumlah Beban Persediaan, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut :

Mutasi Tambah:		
Saldo Awal Barang Konsumsi	Rp	343.200
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	13.161.787
Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid 19	Rp	1.595.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	15.099.987
Mutasi Kurang:		
Beban Persediaan Rusak/Usang	Rp	-
Nilai Persediaan Barang Konsumsi	Rp	-912.113
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	-912.113
Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021	Rp	14.187.874

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10.967.468.415,00 dan Rp41.210.143.667,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Adapun Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel D.4 Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	8.555.293.433	21.291.308.837	(59,82)
Beban Pengiriman Surat Pos Pusat	680.600	843.800	(19,34)
Beban Honor Operasional Satuan kerja	467.432.000	535.290.000	(12,68)
Beban Barang Operasional Lainnya	129.165.000	935.290.068	(86,19)
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	231.942.586	2.508.469.070	(90,75)
Beban Bahan	586.117.405	6.460.805.193	(90,93)
Beban Honor Output Kegiatan	103.820.000	2.945.470.000	(96,48)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	52.386.000	64.485.514	(18,76)
Beban Langganan Listrik	153.601.908	167.449.065	(8,27)
Beban Langganan Telepon	5.011.378	13.928.407	(64,02)
Beban Langganan Air	16.602.608	23.066.426	(28,02)
Beban Jasa Konsultan	0	14.500.000	(100,00)
Beban Sewa	566.109.500	4.134.722.000	(86,31)
Beban Jasa Profesi	38.100.000	273.500.000	(86,07)
Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	39.453.000	919.603.200	-
Beban Jasa Lainnya	4.162.997	918.962.087	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	17.590.000	2.450.000	617,96
Jumlah	10.967.468.415	41.210.143.667	(73,39)

Ada penurunan Beban Barang dan Jasa dikarenakan adanya pengurangan pada pengadaan sewa kendaraan roda empat pada Bawaslu Kabupaten/Kota. Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan jumlah Beban Barang dan Jasa, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut :

Mutasi Tambah:		
Belanja barang dan jasa	Rp	10.982.037.017
Belanja barang dan jasa yang masih harus dibayar	Rp	21.424.407
Beban Aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin	Rp	17.590.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	11.021.051.424
Mutasi Kurang:		
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (Prepaid)	Rp	-46.350.000
Jurnal Balik Atas Beban Tahun Yang Lalu	Rp	-7.233.009
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	-53.583.009
Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021	Rp	10.967.468.415

Beban
Pemeliharaan
Rp654.451.304

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp654.451.304,00 dan Rp1.054.495.304,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Adanya penurunan nilai beban pemeliharaan dari tahun sebelumnya dikarenakan beban pemeliharaan peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor jumlahnya berkurang dari tahun sebelumnya. Adapun Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut :

Tabel D.5 Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	144.733.653	108.007.100	34,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	509.717.651	946.488.204	-46,15
Jumlah	654.451.304	1.054.495.304	-37,94

Beban Perjalanan
Dinas
Rp3.780.173.124

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.780.173.124,00 dan Rp11.914.907.443,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Ada penurunan nilai beban perjalanan dinas dari tahun sebelumnya dikarenakan kegiatan rapat tahapan pilkada tahun 2020, sehingga sering dilaksanakan perjalanan dinas. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

Tabel D.6 Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.862.543.124	2.413.225.443	18,62
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.915.000	2.138.525.000	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	855.715.000	7.363.157.000	-88,38
Jumlah	3.780.173.124	11.914.907.443	-68

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1.074.100.130

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.074.100.130,00 dan Rp1.205.751.772,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut :

Tabel D.7 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.044.881.848	1.160.030.522	(9,93)
Beban Amortisasi Software	20.426.250	45.301.250	(54,91)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	8.792.032	420.000	1.993,34
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.074.100.130	1.205.751.772	(10,92)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Rp113.272.600

D.8 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp113.272.600,00 dan Rp491.983.444,00. Adapun Rincian Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut :

Tabel D.8.1 Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional

URAIAN DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPEARSIONAL	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	4.099.900	31.800.000
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(199.500.000)	(148.470.000)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(195.400.100)	(116.670.000)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	82.127.500	-
Pendapatam Perolehan Aset Lainnya	-	31.350.000
Beban Persediaan Rusak/Usang	-	(406.663.444)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	82.127.500	(375.313.444)
Defisit dari Kegiatan Non Oeprasional	(113.272.600)	(491.983.444)

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp195.400.100,00 yaitu diperoleh dari pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya berupa pendapatan hasil lelang barang BMN tahun 2021 sebesar Rp4.099.900,00 dan beban kerugian pelepasan aset berupa hibah keluar aset tetap renovasi berupa renovasi gedung

dan bangunan sebesar Rp199.500.000,00. Sedangkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yaitu diperoleh dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian honorarium pokja pada tahun 2020 sebesar Rp82.127.500,00. Adapun rincian penjelasan Pendapatan dan Pengembalian Belanja diatas sebagai berikut:

Tabel D.8.2 Rincian Penjelasan Pendapatan dan Pengembalian Belanja

URAIAN	Tanggal	NTPN	Nilai
Pendapatan lelang tahun 2021	04/02/2021	36C058N3DNEE6F5	4.099.900
Pengembalian honor Pokja Bawaslu Kab. Badung	28/04/2021	799BD48VUTP5NPCS	18.335.000
Pengembalian honor Pokja Bawaslu Kab. Tabanan	28/04/2021	CFA4348VUIP5P5TQ	54.482.500
Pengembalian honor Pokja Bawaslu Kab. Karangasem	28/04/2021	1684Q9N3DNL303JP	285.000
Pengembalian honor Pokja Bawaslu Kab. Jembrana	28/04/2021	98D642G4UTKCVB7E	9.025.000

Defisit LO

Rp23.881.888.832

D.9 DEFISIT LO

Defisit LO per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp23.881.888.832,00 dan Rp62.784.696.284,00. Defisit LO merupakan Defisit Dari Kegiatan Operasional sebesar Rp23.768.946.407,00 ditambah dengan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp113.272.600,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp12.758.699.920

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12.758.699.920,00 dan Rp10.490.448.827,00.

Defisit LO
Rp23.881.888.832

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp23.881.888.832,00 dan Rp62.784.696.284,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Atas
Reklasifikasi Aset
Tetap (Rp955.500)

E.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Tetap

Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Tetap merupakan koreksi atas ketidakmampuan aplikasi saiba membaca perubahan jurnal dari aplikasi Simak. Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp955.500,00) dan Rp0.

Tabel E.3 Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Tetap

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Reklasifikasi Aset Tetap Keluar :		
Focusing Screen/Layar LCD Projector	(650.000)	-
Uninterruptible Power Supply (UPS)	(715.000)	-
Total Perolehan	(1.365.000)	-
Akumulasi Penyusutan	409.500	-
Jumlah	(955.500)	-

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp460.239

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas ketidakmampuan aplikasi saiba membaca perubahan jurnal dari aplikasi Simak. Koreksi pencatatan Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp460.239,00 dan Rp17.363.450,00.

Tabel E.4 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	460.239	-
Saldo Awal (Reward Bank 2020) :		
LCD Projector/Infocus World Screen	-	5.390.000
Focusing Screen/Layar LCD Projector Infocus	-	650.000
A.C. Split DAIKIN	-	13.180.500
Total Perolehan	460.239	19.220.500
Akumulasi Penyusutan	-	1.857.050
Jumlah	460.239	17.363.450

Koreksi Lain-Lain
Rp7.816.848.721

E.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi atas ketidakmampuan aplikasi saiba membaca perubahan jurnal dari aplikasi Simak. Koreksi Lain-Lain per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.816.848.721,00 dan Rp0. Nilai tersebut diperoleh dari pengesahan pengembalian sisa dana hibah pilkada tahun 2020 yang perolehan hibahnya pada tahun 2020. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel E.5 Rincian sisa dana hibah yang dikembalikan

Uraian	Saldo 31 Desember Tahun 2020	Realisasi (SP2HL)	Sisa Dana Hibah yang dikembalikan
KAB. BADUNG	1.725.636.669	258.148.736	1.467.487.933
KAB. BANGLI	2.132.664.664	211.365.560	1.921.299.104
KOTA DENPASAR	1.853.504.270	349.063.600	1.504.440.670
KAB. JEMBRANA	952.147.962	182.768.400	769.379.562
KAB. KARANGASEM	2.020.564.107	389.493.000	1.631.071.107
KAB. TABANAN	787.399.345	264.229.000	523.170.345
Jumlah	9.471.917.017	1.655.068.296	7.816.848.721

Transaksi Antar
Entitas
Rp21.397.866.899

E.6 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp21.397.866.899,00 dan Rp65.035.583.927,00. Adapun rincian nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Tabel E.6 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	21.375.374.299	25.295.217.608
Diterima dari Entitas Lain	(86.227.400)	(45.501.681)
Pengesahan Hibah Langsung	108.720.000	39.785.868.000
Jumlah	21.397.866.899	65.035.583.927

Transaksi Antar Entitas tersebut terdiri atas:

1. Nilai Ditagihkan ke Entitas Lain untuk per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing adalah sebesar Rp21.375.374.299,00 dan Rp25.295.217.608,00. Adapun Rincian nilai Ditagihkan ke Entitas Lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel E.6.1 Rincian Nilai Ditagihkan ke Entitas Lain

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Pegawai	7.273.117.863	6.831.602.398
Belanja Barang	13.776.349.936	18.207.140.210
Belanja Modal	325.906.500	256.475.000
Jumlah	21.375.374.299	25.295.217.608

2. Nilai Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing adalah sebesar Rp86.227.400,00 dan Rp45.501.681,00. Adapun Rincian nilai Diterima dari Entitas Lain tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel E.6.2 Rincian Nilai Diterima dari Entitas Lain

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	4.099.900	31.800.000
Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	82.127.500	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	13.701.681
Jumlah	86.227.400	45.501.681

3. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing adalah sebesar Rp108.720.000,00 dan Rp39.785.868.000,00.

Adapun Rincian nilai Pengesahan Hibah Langsung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel E.6.3 Rincian Nilai Pengesahan Hibah Langsung

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Hibah Uang dari Pemerintah 6 Kab/Kota yang Berpilkada Tahun 2020	-	39.785.868.000
Hibah Barang dari Pemerintah Provinsi Bali	108.720.000	-
Jumlah	108.720.000	39.785.868.000

Tabel E.6.3.1 Rincian Nilai Pengesahan Hibah Langsung (Hibah Uang)

URAIAN	Nomor Register	Jumlah
Dana Hibah Pilkada Tahun 2020:		
Bawaslu Kabupaten Badung	2TCCP3DA	8.349.219.000
Bawaslu Kabupaten Bangli	29RMHJ2A	5.232.532.000
Bawaslu Kota Denpasar	2JSUCHFA	5.880.795.000
Bawaslu Kabupaten Jembrana	2WK4GNBA	4.358.516.000
Bawaslu Kabupaten Karangasem	22WZHPPA	8.714.806.000
Bawaslu Kabupaten Tabanan	2ETMGVVA	7.250.000.000
Jumlah		39.785.868.000

Tabel E.6.3.2 Rincian Nilai Pengesahan Hibah Langsung (Hibah Barang)

URAIAN	Kuantitas	Nilai
Peralatan dan Mesin:		
Lemari Kayu	1	3.000.000
Rak Kayu	13	33.700.000
Meja Kerja Kayu	15	36.875.000
Kursi Besi/Metal	17	21.145.000
Sice	1	5.500.000
Meja Rapat	1	2.500.000
A.C. Split	1	4.000.000
Kipas Angin	2	2.000.000
Jumlah	51	108.720.000

Penurunan Ekuitas
Rp10.301.365.915

E.7 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Penurunan Ekuitas per 31 Desember Tahun 2021 dan Kenaikan Ekuitas per 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10.301.365.915,00 dan Rp2.268.251.093,00. Penurunan Ekuitas diperoleh dari jumlah Defisit LO ditambah dengan nilai Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Koreksi Lain-Lain dan nilai Transaksi Antar Entitas.

Tabel E.7 Rincian Nilai Penurunan Ekuitas

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun) %
Defisit LO	(23.881.888.832)	(62.784.696.284)	(62)
Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Tetap	(955.500)		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	460.239	17.363.450	(97)
Koreksi Lain-Lain	(7.816.848.721)	-	-
Transaksi Antar Entitas	21.397.866.899	65.035.583.927	(67)
Jumlah	(10.301.365.915)	2.268.251.093	(226)

Ekuitas Akhir
Rp2.457.334.005

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.457.334.005,00 dan Rp12.758.699.920,00. Nilai Ekuitas Akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp12.758.699.920,00 dikurangi dengan nilai Penurunan Ekuitas sebesar Rp10.301.365.915,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 REKENING PEMERINTAH

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebanyak 10 rekening, yang terdiri dari:

1. Rekening Rupiah Murni Satker Bawaslu Provinsi sejumlah 1 rekening.
2. Rekening Rupiah Murni Bawaslu Kabupaten/Kota sejumlah 9 rekening.

Adapun untuk Rincian Rekening Pemerintah di Lingkungan Bawaslu Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Nama Rekening	Nomor Rekening	Nomor Surat Ijin	Bank
BPG 037 BAWASLU PROVINSI BALI	036801001449304	S-59/WPB.21/KP.0130/2015	BRI
BPP 037 PANWAS KAB.BADUNG	057201000859307	S-145/WPB.21/KP.037/2017	BRI
BPP 037 PANWAS KAB.BANGLI	023301001030302	S-146/WPB.21/KP.037/2017	BRI
BPP 037 PANWAS KAB.BULELENG	008801001327300	S-147/WPB.21/KP.037/2017	BRI
BPP 037 PANWAS KOTA DENPASAR	05720100856309	S-153/WPB.21/KP.037/2017	BRI
BPP 037 PANWAS KAB.GIANYAR	024801001638307	S-148/WPB.21/KP.037/2017	BRI
BPP 037 PANWAS KAB.JEMBRANA	012501001248300	S-149/WPB.21/KP.037/2017	BRI
BPP 037 PANWAS KAB.KLUNGKUNG	011401001129305	S-151/WPB.21/KP.037/2017	BRI
BPP 037 PANWAS KAB.KARANGASEM	24101001418301	S-150/WPB.21/KP.037/2017	BRI
BPP 037 PANWAS KAB.TABANAN	057301000429300	S-152/WPB.21/KP.037/2017	BRI

F.2 PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PERUBAHANNYA

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Adapun **Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang** Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yaitu **Ida Bagus Putu Adinatha, AP, M.Si** yang merupakan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 067/KU.01.00/BA/07/2021 tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Bali Nomor: 002/KU.01.00/BA/I/2021 tentang Penetapan **Pejabat Pembuat Komitmen** dan **Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar** Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 yaitu sebagai berikut :

1. **I Made Aji Swardhana, AP, M.Si** ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
2. **Ni Komang Fitri Suarnadi, S.E** ditunjuk sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 003/KU.01.00/BA/I/2021 tentang Penunjukan **Bendahara Pengeluaran** Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 yaitu **Putu Happy Merta Dinasandy, A.Md.Akun** ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 010/KU.01.00/BA/I/2021 tentang Penunjukan **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2021 yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	I Ketut Winasa, S.Sos	PPK Bawaslu Kabupaten Tabanan
2	I Wayan Sugita	PPK Bawaslu Kabupaten Badung
3	I Dewa Putu Apriyanta,SSTP.,M.Si	PPK Bawaslu Kabupaten Bangli
4	Ni Made Rusmini, SE	PPK Bawaslu Kabupaten Klungkung
5	I Wayan Budi Mahendra, A.Md.Akun	PPK Bawaslu Kabupaten Gianyar
6	Ana Maulidah Awaliyah, S.Sos	PPK Bawaslu Kabupaten Jembrana
7	I Made Widia, SH	PPK Bawaslu Kabupaten Karangasem
8	Ni Wayan Ernirusita, SE	PPK Bawaslu Kota Denpasar
9	Made Jonik Ariningsih	PPK Bawaslu Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 010/KU.01.00/BA/I/2021 tentang Penetapan **Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)** di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2021 yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	I Made Adi Swastana Putra, S.Sos	BPP Bawaslu Kabupaten Tabanan
2	Ni Putu Ratih Martini, SE	BPP Bawaslu Kabupaten Badung
3	Luh Putu Novi Susanti	BPP Bawaslu Kabupaten Bangli
4	I Nyoman Arya Suyasa, S.Sos	BPP Bawaslu Kabupaten Klungkung
5	I Putu Edi Sumantra, SE	BPP Bawaslu Kabupaten Gianyar
6	I Nengah Muliartana, S.Sos	BPP Bawaslu Kabupaten Jembrana
7	I Komang Arya Susila, S.Sos	BPP Bawaslu Kabupaten Karangasem
8	Luh Kadek Yuli Pramedio	BPP Bawaslu Kota Denpasar
9	Made Sustiadnyana, SH	BPP Bawaslu Kabupaten Buleleng

F.3 ADANYA SOTK YANG BARU

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/ kota. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat pemungutan Suara. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2021 terdapat perubahan SOTK baru dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nama	Eselon
Kepala Sekretariat	Ida Bagus Putu Adinatha, AP, M.Si	II b
Kepala Bagian Administrasi	I Wayan Rissiko, S. Sos	III b
Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	I Made Aji Swardhana, AP, M.Si	III b
Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Ni Luh Supri Cahyani, AP, M.Si	III b

Adanya Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda dan Pranata Keuangan APBN Terampil pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. Hal ini berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1484/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XI/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Dalam Jabatan Fungsional Keahlian Melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1484/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XI/2020 Tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil pada Sekretaris Bawaslu Provinsi Bali.

Adanya Jabatan Kepala Sekretariat pada Bawaslu Kabupaten Badung. Hal ini berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

F.4 PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melakukan realisasi untuk penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut:

F.4.1 Penanganan Pandemi Covid-19 (Menggunakan Akun Khusus Penanganan Pandemi COVID-19)

No.	Kode/Jenis Belanja	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1.	521131 / Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	231.942.586	Penanganan Pandemi COVID-19 Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota berupa Pengadaan Masker, Handsanitizer, Obat-obatan dan Vitamin,

			Penyemprotan Disinfektan di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota.
2.	521841 / Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.595.000	Penanganan Pandemi COVID-19 Bawaslu Provinsi berupa Pengadaan alat uji medis rapid test di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali.
3.	522192 / Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	39.453.000	Penanganan Pandemi COVID-19 Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota berupa Rapid Test/Swab perjalanan dinas di Bawaslu Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota.

F.4.2 Penanganan Pandemi Covid-19 (Menggunakan Akun Biasa)

No.	Kode/Jenis Belanja	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1.	521219 / Belanja Barang Non Operasional	52.386.000	Belanja Barang Non Operasional berupa biaya pulsa / paket data untuk staf menunjang kegiatan secara daring / online di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali.

F.5 HIBAH

Ada 6 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020. Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 memberikan Hibah Dana/Uang kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan Pilkada Tahun 2020 untuk mendukung teknis penyelenggaraan yang JURDIL dan LUBER. Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pihak penyelenggara Pilkada Tahun 2020 melakukan Perjanjian Penerimaan Hibah yang selanjutnya disebut sebagai NPHD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berpilkada. Adapun untuk Nilai NPHD masing-masing Bawaslu Kabupate/Kota yg menerima hibah, dana hibah yang sudah terealisasi, dan sisa dana hibah yang di kembalikan dapat dilihat pada lampiran F.5

F.6 HASIL PENILAIAN PIPK

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Bali. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif sebagaimana Lampiran Hasil PIPK Tahun Anggaran 2021.

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran
2. Kas Lainnya di K/L dari Hibah
3. Peralatan dan Mesin

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

Tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah (Jika Tidak ada temuan).

Lampiran C.3
Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

Rincian Pembelian dan Pemakaian Nilai Persediaan per 31 Desember 2021

No	Uraian	Harga Satuan	Pembelian		Pemakaian	
			Kuantitas	Jumlah	Kuantitas	Jumlah
1	- Amplop Paperline No.90	22.000	3	66.000	3	66.000
2	- Post It Pronto	7.150	20	143.000	20	143.000
3	- Binder Clip Joyko No 105	2.508	36	90.288	36	90.288
4	- Binder Clip Joyko No 111	4.510	26	117.260	26	117.260
5	- Binder Clip No 155	6.006	20	120.120	20	120.120
6	- Zipper Bag jaring Kancing 2	12.100	14	169.400	14	169.400
7	- Stopmap Folio	20.900	4	83.600	4	83.600
8	- Isi Staples Max No. 10 Asli	2.310	12	27.720	12	27.720
9	- Pena Pilot Balliner	13.750	63	866.250	63	866.250
10	- Amway Polos 310 Tali	1.045	10	10.450	10	10.450
11	- Sidu HVS 70 GSM A4	38.500	30	1.155.000	30	1.155.000
12	- Bantex Ordner	28.006	5	140.030	5	140.030
13	- Tip Ex Kenko Botol Ke 1	4.400	1	4.400	1	4.400
14	- Penggaris Besi 30cm	1.980	1	1.980	1	1.980
15	- Post It Pronto 50x75	4.950	16	79.200	16	79.200
16	- Pena Snowman V1 Semi Gell Htm	1.705	48	81.840	43	73.315
17	- Box File Palapa JB+KAC	13.200	4	52.800	4	52.800
18	- Zipper Bag Jaring Kancing	13.750	16	220.000	16	220.000
19	- Penghapus Steadler B40 Kecil	1.750	2	3.500	2	3.500
20	- SIDU HVS 70 GSM A4	39.006	88	3.432.528	88	3.432.528
21	- Isi Staples MAX	4.400	2	8.800	2	8.800
22	- Binder Clip Joyko No. 107	3.509	10	35.090	10	35.090
23	- Joyko Triagonal Clip No 3	1.485	27	40.095	27	40.095
24	- Lem Stik Pronto 8 gr	3.509	1	3.509	1	3.509
25	- Binder Clip Joyko No. 200	9.504	4	38.016	4	38.016
26	- Buku Folio Kiky 200 lbr	32.505	7	227.535	7	227.535
27	- Pena Pilot Balliner Hitam	13.750	1	13.750	1	13.750
28	- Lakban 2" Daimaru Bening	11.506	1	11.506	1	11.506
29	- Isolasi Double Tape Nachi 2"	9.900	1	9.900	1	9.900
30	- Buku Disposisi	12.500	40	500.000	27	337.500
31	- Box File Bantex	26.510	2	53.020	2	53.020
32	- Sidu HVS 70 GSM F4	41.030	54	2.215.620	54	2.215.620
33	- Binder Clip No 105	2.500	4	10.000	4	10.000
34	- Tipe Ex Kenko Botol ke-01	5.016	3	15.048	3	15.048
35	- Stabilo Boss	6.006	1	6.006	1	6.006
36	- Tipe Ex Kenko Botol Ke-107	5.500	2	11.000	2	11.000
37	- Stopmap Folio	22.000	1	22.000	1	22.000
38	- Buku Folio kiky 100lbr	18.007	8	144.056	8	144.056
39	- Binder Clip Joyko No.260	13.508	5	67.540	5	67.540
40	- Post It Pronto 75*125	9.900	1	9.900	1	9.900
41	- Stopmap Folio Bawaslu	7.000	100	700.000	100	700.000
42	- Binder Clip 111	4.500	4	18.000	4	18.000
43	- Trigonal Clip No 3	1.650	10	16.500	10	16.500
44	- Binder Clip No 107	3.000	2	6.000	2	6.000
45	- Pena Snowman V1	1.650	54	89.100	54	89.100
46	- Map Plastik Kancing	2.000	3	6.000	3	6.000
47	- Stabilo Boss	6.000	1	6.000	1	6.000
48	- Hand Sanitizer 5 L	319.000	5	1.595.000	5	1.595.000
49	- Buku Folio Kiky	18.700	2	37.400	2	37.400
50	- Sidu HVS 70 GSM A4	38.005	18	684.090	18	684.090
51	- Amplop Paperline No 90	18.502	1	18.502	1	18.502
52	- Stopmap Diamond Oranye	2.200	35	77.000	35	77.000
53	- Clear Holder Big 40	17.501	5	87.505	5	87.505
54	- Stopmap Bawaslu	7.500	100	750.000	10	75.000
55	- Isi Staples No 10 Max	2.409	3	7.227	3	7.227
56	- Pena FASTER C-600 Hitam	1.980	30	59.400	30	59.400
57	- Binder Clip Joyko No 280	20.009	1	20.009	1	20.009
58	- Zipper Bag Jaring Kancing 2	12.650	5	63.250	5	63.250
59	- Isi Staples Kangaro No 10	1.750	4	7.000	4	7.000

60	- Triagonal Clip No 3 Joyko	1.507	10	15.070	4	6.028
61	- Trigonal Clip No. 5 Kenko	3.806	15	57.090	10	38.060
62	- Post It Sign Here 45649	14.300	2	28.600	2	28.600
63	- Spidol Snowman G12 Hitam	7.007	1	7.007	1	7.007
64	- Post It Pronto Mark n Note 6 Color	7.150	5	35.750	5	35.750
65	- Spidol Snowman WB Hitam	7.502	2	15.004	2	15.004
66	- Lem Povinal Tanggung	4.510	1	4.510	1	4.510
67	- Amplop Samson D	38.016	1	38.016	-	-
68	- Bolpoint Pilot Balliner Biru	-	-	-	-	63.000
69	- Binder Clip No.155	-	-	-	-	27.000
70	- Binder Clip Joyko No.105	-	-	-	-	7.200
71	- Binder Clip No.111	-	-	-	-	6.000
72	- Kertas HVS Sidu F4 70 gr	-	-	-	-	240.000
Jumlah			1.014	14.756.787	894	14.187.874

Lampiran C.4

Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

No	Kode Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	3.02.01.02.003	Mini Bus	10	3.489.800.000
2	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	3	47.843.400
3	3.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable	2	3.000.000
4	3.05.01.04.001	Lemari Besi/ Metal	11	43.300.000
5	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	8	65.290.000
6	3.05.01.04.003	Rak Besi	6	55.955.000
7	3.05.01.04.004	Rak Kayu	13	33.700.000
8	3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	3	11.500.000
9	3.05.01.04.007	Brandkas	1	11.200.000
10	3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	2	5.242.500
11	3.05.01.05.007	CCTV	11	156.824.229
12	3.05.01.05.008	Papan Visual/ Papan Nama	10	4.500.000
13	3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	3	9.375.000
14	3.05.01.05.017	Mesin Absensi	12	29.462.900
15	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	13	70.182.000
16	3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	9.000.000
17	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	76	537.107.250
18	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	134	289.931.800
19	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	12	36.000.000
20	3.05.02.01.005	Sice	5	28.000.000
21	3.05.02.01.008	Meja Rapat	3	35.700.000
22	3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.500.000
23	3.05.02.04.004	AC Split	43	210.265.500
24	3.05.02.04.006	Kipas Angin	2	2.000.000
25	3.05.02.06.002	Televisi	11	50.118.198
26	3.05.02.06.008	Sound System	13	69.109.000
27	3.05.02.06.014	Microphone	1	5.400.000
28	3.05.02.06.026	Lambang Garuda Pancasila	1	550.000
29	3.05.02.06.030	Tiang Bendera	2	700.000
30	3.05.02.06.031	Pataka	1	1.500.000
31	3.05.02.06.036	Dispenser	1	2.500.000
32	3.05.02.06.040	Palu Sidang	1	350.000
33	3.05.02.06.046	Handy Cam	6	93.952.100
34	3.05.02.06.077	Bendera Negara	1	500.000
35	3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	12.870.000
36	3.06.01.01.088	Voice Recorder	11	14.600.000
37	3.06.01.02.128	Camera Digital	16	156.824.175
38	3.06.01.02.132	Video Conference	1	117.232.500
39	3.06.01.04.031	Mesin Potong	1	5.575.000
40	3.06.01.04.045	Mesin Barcode	1	5.000.000
41	3.06.02.01.001	Telephone (PABX)	1	14.876.913
42	3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	1	1.884.300
43	3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	4	9.600.000
44	3.06.02.01.010	Facsimile	3	6.850.000
45	3.07.01.01.999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	8	14.080.000
46	3.10.01.02.001	PC Unit	45	623.373.000
47	3.10.01.02.002	Lap Top	58	689.665.913
48	3.10.01.02.003	Note Book	7	77.945.000
49	3.10.02.03.003	Printer	63	261.152.500
50	3.10.02.03.004	Scanner	13	295.738.600
51	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	4	6.484.500
52	3.10.02.04.002	Router	3	5.250.000
53	3.10.02.04.003	Hub	1	1.485.000
54	3.10.02.04.021	Kabel UTP	1	2.035.000
55	3.10.02.04.026	Acces Point	1	1.320.000
56	3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	1	495.000
Total Peralatan dan Mesin			677	7.737.696.278

Lampiran C.7

Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021

No	Kode Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	3.02.01.02.003	Mini Bus	10	3.489.800.000	2.289.800.006	1.199.999.994
2	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	3	47.843.400	47.843.400	-
3	3.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable	2	3.000.000	3.000.000	-
4	3.05.01.04.001	Lemari Besi/ Metal	11	43.300.000	43.300.000	-
5	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	8	65.290.000	32.945.000	32.345.000
6	3.05.01.04.003	Rak Besi	6	55.955.000	37.365.000	18.590.000
7	3.05.01.04.004	Rak Kayu	13	33.700.000	3.370.000	30.330.000
8	3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	3	11.500.000	11.500.000	-
9	3.05.01.04.007	Brandkas	1	11.200.000	11.200.000	-
10	3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	2	5.242.500	5.003.250	239.250
11	3.05.01.05.007	CCTV	11	156.824.229	91.639.034	65.185.195
12	3.05.01.05.008	Papan Visual/ Papan Nama	10	4.500.000	4.500.000	-
13	3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	3	9.375.000	9.375.000	-
14	3.05.01.05.017	Mesin Absensi	12	29.462.900	19.929.860	9.533.040
15	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	13	70.182.000	37.160.000	33.022.000
16	3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	9.000.000	4.100.000	4.900.000
17	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	76	537.107.250	363.270.075	173.837.175
18	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	134	289.931.800	208.187.260	81.744.540
19	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	12	36.000.000	36.000.000	-
20	3.05.02.01.005	Sice	5	28.000.000	16.600.000	11.400.000
21	3.05.02.01.008	Meja Rapat	3	35.700.000	21.630.000	14.070.000
22	3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.500.000	3.500.000	-
23	3.05.02.04.004	AC Split	43	210.265.500	155.080.250	55.185.250
24	3.05.02.04.006	Kipas Angin	2	2.000.000	200.000	1.800.000
25	3.05.02.06.002	Televisi	11	50.118.198	37.276.840	12.841.358
26	3.05.02.06.008	Sound System	13	69.109.000	31.862.400	37.246.600
27	3.05.02.06.014	Microphone	1	5.400.000	5.400.000	-
28	3.05.02.06.026	Lambang Garuda Pancasila	1	550.000	550.000	-
29	3.05.02.06.030	Tiang Bendera	2	700.000	700.000	-
30	3.05.02.06.031	Pataka	1	1.500.000	1.500.000	-
31	3.05.02.06.036	Dispenser	1	2.500.000	2.500.000	-
32	3.05.02.06.040	Palu Sidang	1	350.000	350.000	-
33	3.05.02.06.046	Handy Cam	6	93.952.100	78.836.050	15.116.050
34	3.05.02.06.077	Bendera Negara	1	500.000	500.000	-
35	3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	12.870.000	12.870.000	-
36	3.06.01.01.088	Voice Recorder	11	14.600.000	12.000.000	2.600.000
37	3.06.01.02.128	Camera Digital	16	156.824.175	100.970.175	55.854.000
38	3.06.01.02.132	Video Conference	1	117.232.500	105.509.250	11.723.250
39	3.06.01.04.031	Mesin Potong	1	5.575.000	5.575.000	-
40	3.06.01.04.045	Mesin Barcode	1	5.000.000	5.000.000	-
41	3.06.02.01.001	Telephone (PABX)	1	14.876.913	14.876.913	-
42	3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	1	1.884.300	1.884.300	-
43	3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	4	9.600.000	6.720.000	2.880.000
44	3.06.02.01.010	Facsimile	3	6.850.000	6.850.000	-
45	3.07.01.01.999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	8	14.080.000	5.632.000	8.448.000
46	3.10.01.02.001	PC Unit	45	623.373.000	519.030.125	104.342.875
47	3.10.01.02.002	Lap Top	58	689.665.913	584.860.176	104.805.737
48	3.10.01.02.003	Note Book	7	77.945.000	74.246.250	3.698.750
49	3.10.02.03.003	Printer	63	261.152.500	213.305.501	47.846.999
50	3.10.02.03.004	Scanner	13	295.738.600	238.557.550	57.181.050
51	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	4	6.484.500	5.273.063	1.211.437
52	3.10.02.04.002	Router	3	5.250.000	5.250.000	-
53	3.10.02.04.003	Hub	1	1.485.000	1.485.000	-
54	3.10.02.04.021	Kabel UTP	1	2.035.000	2.035.000	-
55	3.10.02.04.026	Acces Point	1	1.320.000	1.320.000	-
56	3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	1	495.000	495.000	-
57	3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	1	9.375.000	9.375.000	-
Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			678	7.747.071.278	5.549.093.728	2.197.977.550

Lampiran F.5
REKAPITULASI DANA HIBAH DAN PENCAIRAN BAWASLU
 Update per 31 Desember 2021

KODE SATKER : 686353

NAMA SATKER : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI

No	Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nomor Register	No.NPHD	Tgl.NPHD	Nilai NPHD Tahun 2020	Saldo Awal Tahun 2021	SP2HL Tahun 2021	Jumlah Realisasi Tahun 2021	SP4HL	Saldo 31 Desember 2021
1	2	3	5	6	7	8	11	13=11+12	14	15=8+9-13-14
1	Bawaslu Kabupaten Badung	2TCCP3DA	4012 Tahun 2019 dan 190/BAWASLU-PROV.BA-01/IHM.02.00/X/2019	01 Oktober 2019	8.637.550.000	1.725.636.669	258.148.736	258.148.736	1.467.487.933	-
2	Bawaslu Kabupaten Bangli	29RMHJ2A	727/103/NPHD/PPKP/2020 dan 125.a/K.BAWASLU-PROV.BA-02/KU.00.01/VI/2020	29 Juni 2020	6.946.351.000	2.132.664.664	211.365.560	211.365.560	1.921.299.104	-
3	Bawaslu Kota Denpasar	2JSUCHFA	210/474/BKBP/2020 dan 119/K.Bawaslu.BA-09/KU.00.01/VI/2020	22 Juni 2020	7.300.000.000	1.853.504.270	349.063.600	349.063.600	1.504.440.670	-
4	Bawaslu Kabupaten Jembrana	2WK4GNBA	500/32/KESBANGPOL/I/2020 dan 095/BAWASLU.BA-05/SET/PR.03.00/I/2020	20 Januari 2020	4.558.516.000	952.147.962	182.768.400	182.768.400	769.379.562	-
5	Bawaslu Kabupaten Karangasem	22WZHPPA	900/176/BKBPPM/SETDA dan 051/K.Bawaslu.BA-06/KU.00.01/II/2020	04 Maret 2020	8.964.806.000	2.020.564.107	389.493.000	389.493.000	1.631.071.107	-
6	Bawaslu Kabupaten Tabanan	2ETMGVVA	027/690/BKBP/2020 dan 060.2/K.Bawaslu.BA-08/KU.01.00/VII/2020	02 Juli 2020	7.400.000.000	787.399.345	264.229.000	264.229.000	523.170.345	-
JUMLAH					43.807.223.000	9.471.917.017	1.655.068.296	1.655.068.296	7.816.848.721	-



BAWASLU

SADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Jalan Moh Yamin No. 17-19, Renon, Denpasar
Telepon/Fax : 0361-263859, e-mail : aset.bali@bawaslu.go.id
Laman : www.bawaslu-baliprov.go.id

**LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU PROVINSI BALI**

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Bawaslu Provinsi Bali. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karenanya, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah memadai.

Denpasar, 6 Januari 2022


I WAYAN RISSA O S.SOS
NIP. 196305111987101002

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

1. Kas di Bendahara Pengeluaran
2. Kas Lainnya di K/L dari Hibah
3. Peralatan dan Mesin

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

NO				Rekomendasi
	Uraian	Sebab	Akibat	
1	Tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah.			